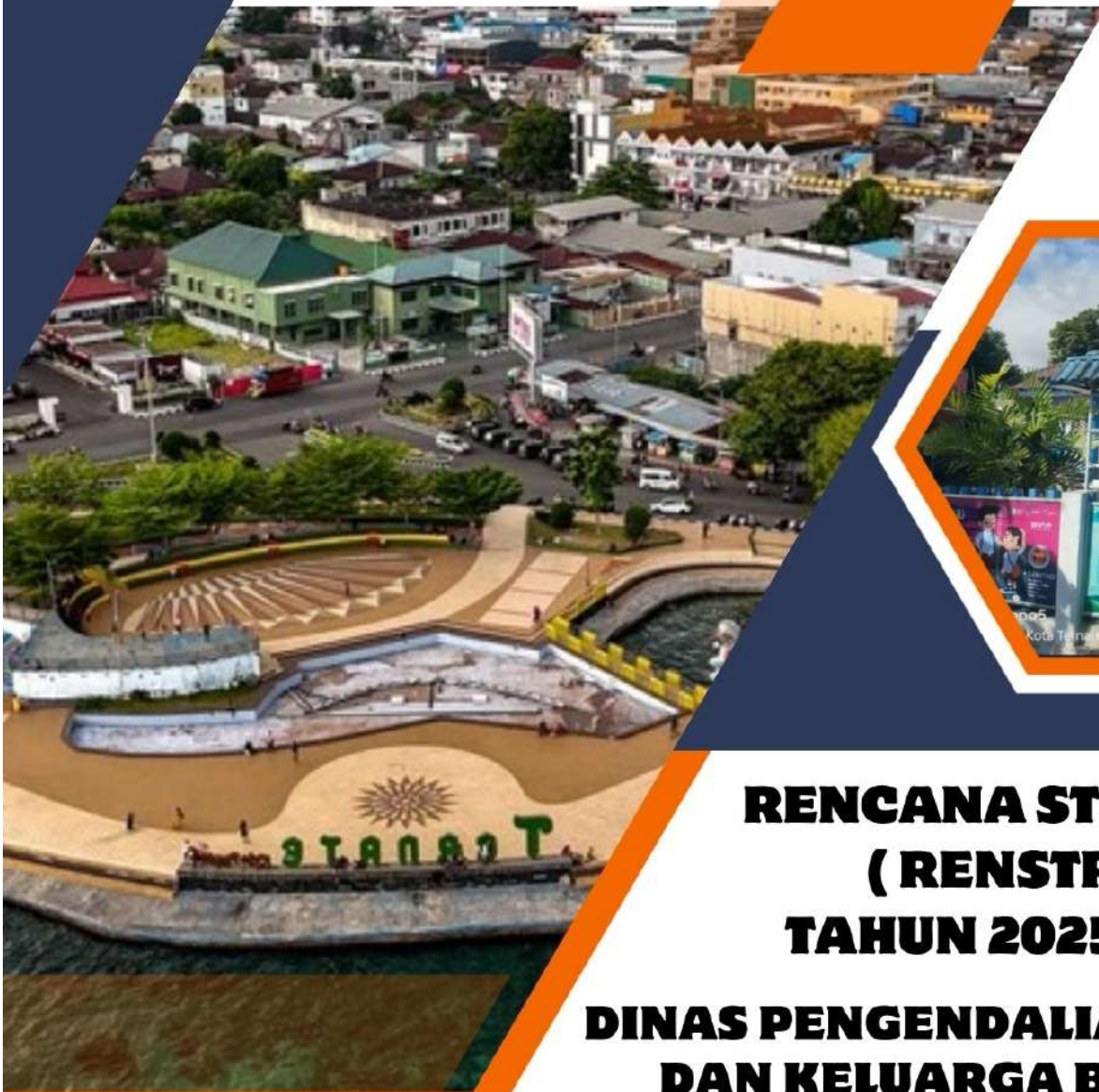




**PEMERINTAH
KOTA TERNATE**

2025-2029



**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

DPPKB

Alamat : Jalan Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate

Telp (0921) 3123926

KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025-2029.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate ini lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, memiliki daya ungkit terhadap pencapaian strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam mewujudkan visi dan misi Kota Ternate Tahun 2025-2029 yaitu dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 menitikberatkan pada penajaman indikator sasaran, Indikator program dan indikator kegiatan, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

Akhirnya, kami berharap seluruh target sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA ini dapat tercapai, sehingga akan menggambarkan keberhasilan kinerja pelayanan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) secara utuh dan menyeluruh di Kota Ternate.

Ternate, 01 September 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Ternate**



RAJMAN, SKM., M.Kes
NIP. 197801172010011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE	7
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Dan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate	19
2.1.3. Capaian Kinerja	23
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.2.2 Isu Strategis	28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan Renstra	38
3.2 Sasaran	39
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	41
3.4 Arah Kebijakan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 Uraian Program	45
4.2 Uraian Kegiatan.....	45
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	66
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	97
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	98
BAB V _PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 2 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Non PNS/PTT Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	20
Tabel 2. 3 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Golongan Tahun 2024	20
Tabel 2. 4 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Eselon Tahun 2024	20
Tabel 2. 5 Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB di Kota Ternate Tahun 2024.....	21
Tabel 2. 6 Daftar Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Balai Penyuluhan KB Kota Ternate Tahun 2024	22
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23
Tabel 2. 8 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.....	25
Tabel 2. 9 Penghargaan dan Prestasi Dinas Pengendalian Penduduk.....	26
Tabel 2. 10 Tingkat Capaian Indikator Kinerja DPPKB Kota Ternate Tahun 2024	26
Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.....	31
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3. 2 Penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.....	42
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.....	43
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	66
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prog Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 - 2029.....	97
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 - 2029.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Renstra PD) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate merupakan dokumen rencana dan berfungsi mengarahkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kota Ternate dan bersifat indikatif. RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dijadikan tolok ukur dalam pencapaian RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate, mulai dari proses perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur, mekanisme

pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah perangkat daerah pelaksana bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

Agenda Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RENSTRA, lebih menitikberatkan kepada upaya pengendalian penduduk serta upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB KOTA TERNATE Renstra 2025-2029 menuju harapan yaitu penduduk Kota Ternate yang tumbuh seimbang dan sejahtera.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pencapaian menurunnya Angka Kelahiran pada Wanita Usia Subur atau Total Fertility Rate (TFR) melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang optimal dan terukur, meningkatkan Median Usia Kawin Perempuan (MUKP) melalui kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIK-R) baik jalur pendidikan maupun jalur kemasyarakatan dan upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta berperan aktif pada upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka turut memberikan andil dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025 – 2029 dan tujuan program pembangunan nasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3824).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
 7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004).
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025—2045.
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
17. Peraturan Walikota Ternate No. 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2021–2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Ternate di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun Rencana Strategis ini ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam jangka menengah.
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Menjabarkan visi, misi agenda pembangunan kedalam arah kebijakan dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terinci, terarah, terukur terhadap perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan yang dapat dilaksanakan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
3. Mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar SKPD, pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja.
5. Mengoptimalkan kerjasama dan membangun kemitraan antara pemerintah daerah , swasta dan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan PD : Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja.
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
 - 2.1.2 Sumber Daya PD
 - 2.1.3 Capaian Kinerja PD
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD
- 3.2. Sasaran Renstra PD
- 3.3. Strategi PD

3.4. Arah Kebijakan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

**BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate merupakan unsur pelaksana bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana. Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate mengacu pada Peraturan Walikota Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan penetapan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan Advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan penyelenggara komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan penggabungan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyampaian laporan, sarana dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Struktur oganisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi :

1. Subag Umum dan Kepegawaian
2. Subag Perencanaan
3. Subag Keuangan

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :

1. Seksi Pemanduan sinkronisasi kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
2. Seksi Analisa Data dan Informasi

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan pendistribusi Alat, Obat Kontrasepsi, dan Jaminan Pelayanan KB
2. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga berencana

e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja, dan Lansia

f. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

1. Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi, dan Penggerakan

2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB

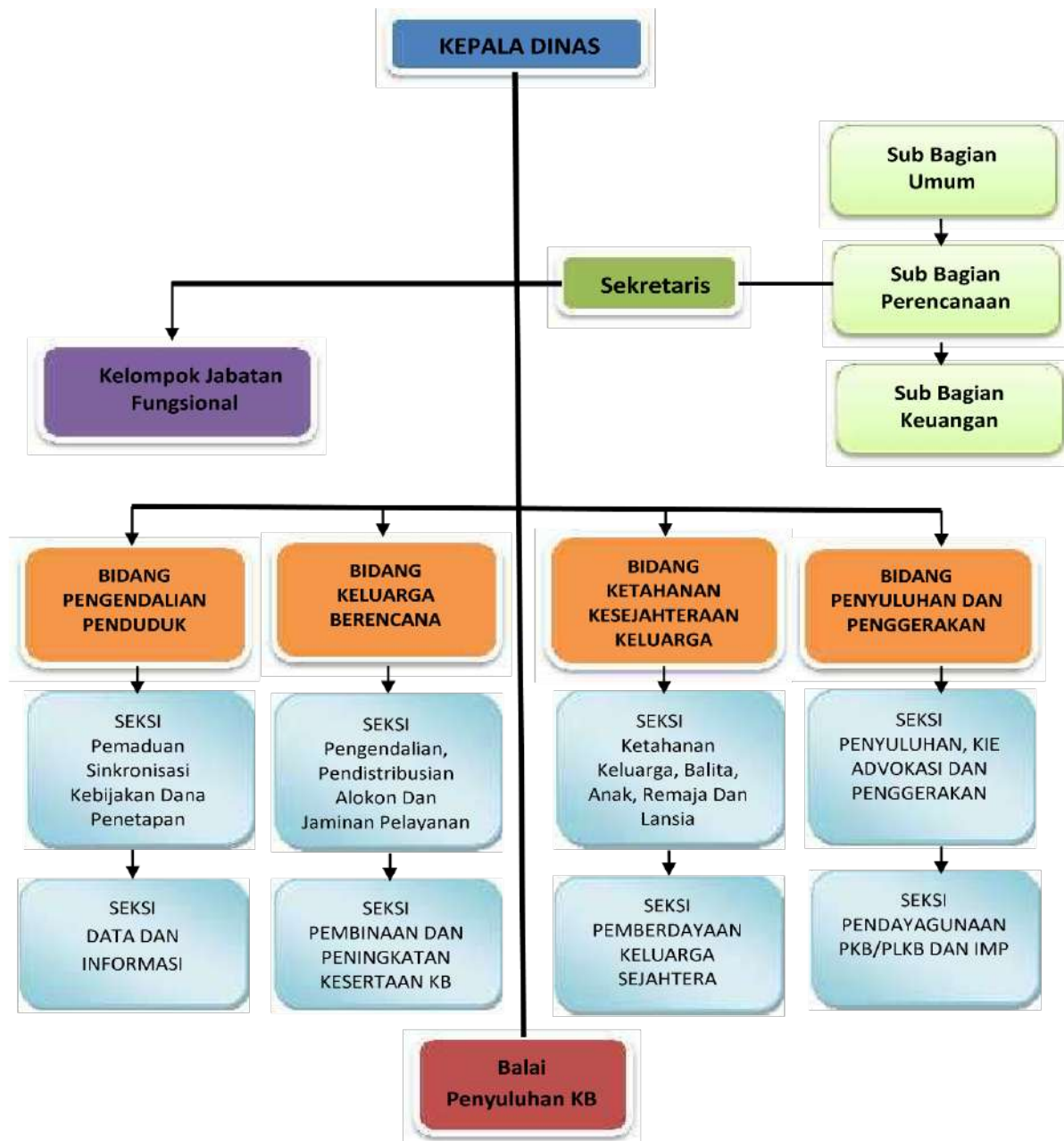
g. Balai Penyuluhan KB

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 tersebut di atas khususnya mengenai Unit Pelaksanaan Teknis telah di bentuk pada 8 (delapan) Kecamatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kordinator Balai Penyuluhan KB
2. Petugas Lapangan (PKB/PLKB)

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dapat dilihat seperti berikut ini :

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TERNATE**



Disamping itu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate di bentuk pula Unit Pelayanan Keluarga Berencana yang disebut Pusat Pelayanan dan Konseling Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Konseling.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. Pelaksanaan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan Verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta laporan penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bendaharawan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sistem pengendalian penduduk, meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan kebijakan dan analisis dampak mengenai kependudukan dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

Melaksanakan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

- a. Pelaksanaan Norma Prosedur, Standard dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan (parameter) Pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;

- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

5.1 Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :

Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melakukan tugasnya Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dibidang kependudukan dan keluarga berencana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian kebijakan dan kesertaan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan supervisi koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

5.2. Seksi Analisa Data dan Informasi

Seksi Analisa data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melakukan tugasnya Seksi Analisa Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi ;

- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional lingkup tugas seksi ;
- d. Pelaksanaan data dan penyebarluasan informasi ;
- e. Pelaksanaan analisa dan kriteria sistem informasi dan dokumentasi berdasarkan hasil advokasi dan rumusan;
- f. Pelaksanaan sistem pelaporan dan advokasi bidang kependudukan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG KELUARGA BERENCANA

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan Keluarga, meliputi akses pemberian informasi konseling, bimbingan dan pemenuhan kebutuhan sosial budaya dan pendidikan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesetaraan ber KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

6.1. Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi

serta jaminan pelayanan KB. Dalam melakukan tugasnya Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengendalian dan pendistribusian Alat Obat dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pemberian pendistribusian alat obat kontrasepsi ;
- d. Pelaksanaan prosedur jaminan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana. Dalam melakukan tugasnya Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- e. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- g. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7.1 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , membawahi :

Seksi Pemberdayaan Keluarga.

Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma ,standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dalam menyelenggarakan tugas ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan keluarga ;
- e. Pelaksanaan informasi, edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

7.2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lansia. Dalam melakukan tugasnya Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- d. Pelaksanaan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL);
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan model-model ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintah dan pembangunan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :

8.1 Seksi Penyuluhan, KIE Advokasi dan Penggerakan

Seksi Penyuluhan, KIE Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma ,standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan. Dalam melakukan tugas tersebut bidang seksi Penyuluhan ,KIE, Advokasi dan penggerakan melaksanakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan penyusunan standarisasi seksi;
- d. Pelaksanaan pemantauan penyuluhan KIE, Advokasi dan penggerakan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8.2 Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB

Seksi pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi PKB/PLKB. Dalam melakukan tugasnya Seksi pendayagunaan PKB/PLKB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi pendayagunaan PKB/PLKB;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
- c. Pelaksanaan Penyusunan standarisasi seksi pendayagunaan PKB/PLKB
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi menentukan strategi penanganan cepat, efektif dan efisien terhadap kinerja PKB/PLKB;
- e. Pelaksanan konseling secara umum maupun khusus kepada kelompok-kelompok binaan;

- f. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring skala tetap serta system pengawasan periodik terhadap tugas;
- g. Pelaksanaan supervisi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate hanya terdapat pada Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Ketetapan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pertanggal 24 Juni 2014 Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004. PKB/PLKB dengan jabatan fungsional tertentu adalah pegawai pusat yang diberdayakan di Daerah, pada Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan PERKA BKN Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah/Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber dayamanusia yang dimilikinya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah 39 Orang dan Non PNS/PTT 66 orang. Adapun Keadaan Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dapat dilihat Pada table berikut ;

Tabel 2. 1 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5 orang
2	Sarjana (S1)	14 orang
3	D IV	-

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
4	D III	7 orang
5	D I	1 orang
6	SMA/SMK	4 orang
	JUMLAH	31 orang

Tabel 2. 2 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Non PNS/PTT Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	21 orang
3	D III	22 orang
4	D I	-
5	SMA/SMK	24 orang
	JUMLAH	67 orang

Tabel 2. 3 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Golongan Tahun 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1 orang
2	Golongan III	5 orang
3	Golongan II	6 orang
	JUMLAH	12 orang

Tabel 2. 4 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Eselon Tahun 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	4 orang

NO	GOLONGAN	JUMLAH
4	Eselon IV.a	6 orang
	JUMLAH	12 orang

Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Perlengkapan kantor merupakan alat penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja SKPD. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate masih terbatas dan perlu pemeliharaan sarana dan prasarana baik gedung, peralatan elektronik dan kendaraan, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2. 5 Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB di Kota Ternate Tahun 2024

No	Nama Kantor/Balai	Alamat	Tahun Bangun
1	Balai Penyuluhan KB Ternate Selatan	Jl. Foralaha, Kel. Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan	2012
2	Balai Penyuluhan KB Ternate Tengah	Jl. Gamayou, Kel. Kalumata, Kecamatan Ternate Tengah	2013
3	Balai Penyuluhan KB Pulau Ternate	Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate	2013
4	Balai Penyuluhan KB Ternate Utara	Kelurahan Dufa- Dufa, Kecamatan Ternate Utara	2014
5	Balai Penyuluhan KB Pulau Batang Dua	Kelurahan Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua	2014
6	Balai Penyuluhan KB Pulau Moti	Kel. Moti Kota, Kecamatan Pulau Moti	2015
7	Balai Penyuluhan KB Pulau Hiri	Kelurahan Mado, Kec. Pulau Hiri	2015

No	Nama Kantor/Balai	Alamat	Tahun Bangun
8	Balai Penyuluhan KB Ternate Barat	Jl. Batu Angus, Kel. Sulamadah, Kecamatan Ternate Barat	2019

Tabel 2. 6 Daftar Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Balai Penyuluhan KB Kota Ternate Tahun 2024

No	PRASARANA	KONDISI			Jumlah (unit/buah/set)
		B	RR	RB	
1	Kendaraan Dinas Operasional Beroda Empat	1	-		
2	Mobil Unit Penerangan (Mupen) KB	-	-	1	
3	Mobil Unit Pelayanan (Muyan) KB Keliling	-	-	1	
4	Mobil Unit Pelayanan (Muyan) KB Keliling	1	-	-	
5	Mobil Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	1	-	-	
6	Kendaraan Dinas Operasional Beroda Dua	48	5	17	
7	Meja Direksi	8	-	2	
8	Meja Kerja	99	-	-	
9	Kursi Direksi	8	-	5	
10	Kursi Kerja	149	-	21	
11	Lemari Arsip	44	3	5	
12	Kursi Tamu	7	-	2	
13	Personal Computer (PC)	18	1	4	
14	Laptop	8	-	8	
15	Projector/ Infocus	9	-	1	
16	Layar/Screen Projector	3	-	-	
17	TV 21 Inc	1	-	1	
18	Waerless	1	-	7	
19	Faksimile	-	-	1	
20	Mesin Ketik	-	-	2	
21	Handycam	-	-	1	
22	Kamera Digital	-	-	2	
23	Kulkas	2	-	-	
24	Rak Obat Kontrasepsi	2	-	-	
25	Alat Pelayanan KB (distribusi ke Faskes Layanan KB);	-	-	-	
	- IUD Kit	-	-	-	
	- Implant Kit	-	-	-	
	- Lemari Alokon	-	-	-	

No	PRASARANA	KONDISI			Jumlah (unit/buah/set)
		B	RR	RB	
26	Alat/Media Penyuluhan Kelompok Kegiatan ;	-	-	-	
	- Bina Keluarga Balita (BKB) Kit	-	-	-	
	- Generasi Berencana (GenRe) Kit	-	-	-	
	- Bina Keluarga Lanjut (BKL) Kit	-	-	-	
	- Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kit	-	-	-	
27	Sarana Kerja PKB/PLKB	-	-	-	
28	Sarana Kerja Kader PPKBD/Sub PPKBD	-	-	-	
		-	-	-	

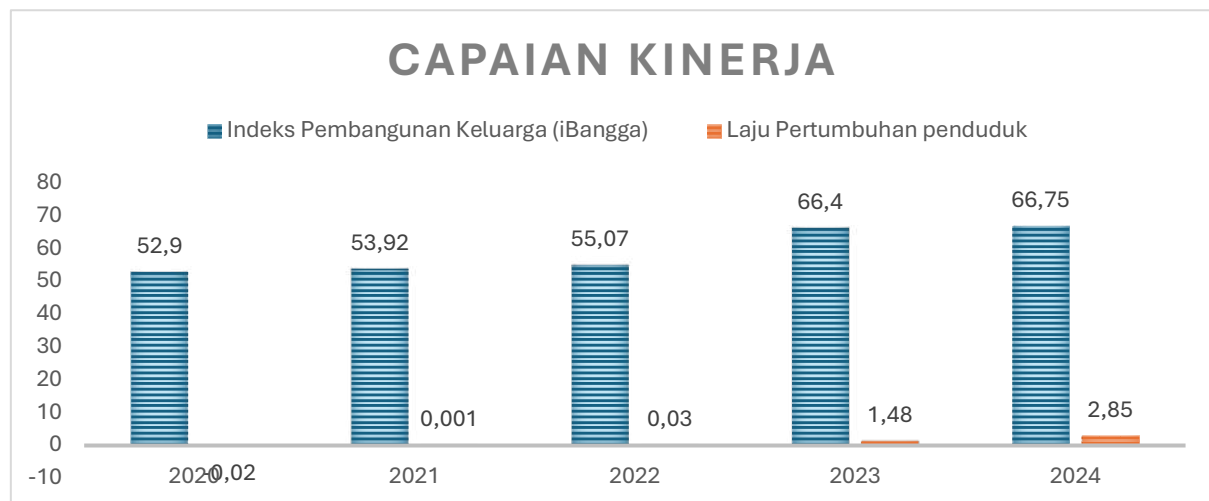
2.1.3. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Ternate. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Renstra Periode sebelumnya (Tahun 2020–2024) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai dasar pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	52,90	53,92	55,07	66,40	66,75	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	-0,02	0,001	0,03	1,48	2,85	



Capaian Realisasi Keuangan DPPKB Kota Ternate Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD. Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2. 8 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate*

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	8.923.214.693,00	6.989.720.502,00	78,3
2021	9.417.973.342,00	9.136.972.891,00	97,02
2022	8.757.419.554,00	8.050.984.648,00	91,93
2023	9.873.515.863,00	9.292.451.869,00	94,11
2024	9.302.923.633,00	8.993.504.820,00	96,67

Adapun capaian prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Penghargaan dan Prestasi Dinas Pengendalian Penduduk

No	Tahun	Jenis Penghargaan/Prestasi
1	2012	Manggala Karya Kencana Bidang KKBPK
2	2016	Satya Lencana Pembangunan Bidang KKBPK
3	2018	Apresiasi Anugerah Kencana Program KKBPK
4	2020	Kampung KB Percontohan

Tabel 2. 10 Tingkat Capaian Indikator Kinerja DPPKB Kota Ternate Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif (CPR)	89,2 %	20.134 PUS	87,62%
		Menurunnya Persentase Angka Kelahiran Total (TFR)	2,18 per 1000 KH	2,07 per 1000 KH	2,07 per 1000 KH
		Menurunnya Persentase Kebutuhan ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	5,2%	1.807 PUS	6,94%
		Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22 Tahun	3.183 Perempuan	23,2 Tahun

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate adalah keluarga, pasangan usia subur (PUS), calon pengantin, remaja, dan masyarakat umum, dengan fokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup advokasi, sosialisasi, serta pelayanan dan penyuluhan mengenai keluarga berencana dan kesehatan keluarga, berikut kelompok rincian sasaran :

- a. **Keluarga dan Pasangan Usia Subur (PUS)** : Ini adalah sasaran utama untuk program keluarga berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan kelahiran dan membentuk keluarga yang berkualitas.
- b. **Calon Pengantin** : Mengalami sosialisasi dan advokasi untuk pencegahan pernikahan dini dan mempersiapkan keluarga yang sehat.
- c. **Remaja** : Sasaran untuk pencegahan pernikahan dini, penekanan angka kematian ibu dan bayi, serta pendidikan kesehatan reproduksi dan keluarga.
- d. **Masyarakat Umum** : Layanan juga mencakup edukasi dan sosialisasi mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Fokus Layanan :

- a. **Advokasi dan Sosialisasi** : Menyampaikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian penduduk dan program KB.
- b. **Penyuluhan dan Pelayanan KB** : Memberikan edukasi tentang alat kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, dan pentingnya keluarga berencana.
- c. **Pembangunan Keluarga Berkualitas** : Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan utama DPPKB Kota Ternate adalah penanganan stunting yang masih tinggi, yang diatasi dengan pendampingan keluarga oleh pendamping di kelurahan dan PLKB untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Permasalahan lain termasuk tantangan mengendalikan ledakan penduduk dan memastikan program keluarga berencana berjalan efektif di Kota Ternate. Permasalahan Utama dan Upaya Penanganan adalah :

Tingginya Angka Stunting: DPPKB Kota Ternate fokus pada penurunan stunting melalui program pendampingan keluarga.

Fokus Edukasi: Disediakan pendamping di setiap kelurahan dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk memberikan edukasi tentang kesehatan dan gizi, termasuk di kelurahan yang satu kelurahan satu PLKB.

Penyediaan Materi Edukasi: Petugas pendamping dibekali materi edukasi yang disesuaikan dengan bahasa lokal agar mudah dipahami masyarakat.

Tantangan Lain:

Ledakan Penduduk: DPPKB memetakan dampak tingginya pertumbuhan penduduk di Ternate, yang dapat menjadi tantangan bagi pembangunan kota.

Efektivitas Program KB: Tingkat pengguna KB yang masih perlu ditingkatkan juga menjadi tantangan agar program nasional "2 Anak Lebih Sehat" dapat lebih efektif.

2.2.2 Isu Strategis

- Isu Strategis Nasional sesuai Tupoksi Perangkat Daerah

Isu lingkungan global terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat erat dengan tekanan sumber daya alam, seperti air bersih dan udara bersih, serta degradasi lingkungan akibat meningkatnya konsumsi dan limbah. Pengendalian pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Upaya pengendalian ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan individu, terutama perempuan, untuk membuat pilihan reproduksi yang sehat, yang juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Isu lingkungan global berdampak langsung pada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, antara lain melalui krisis air dan pangan akibat polusi dan degradasi tanah, serta ancaman bencana seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim, yang menuntut keluarga untuk beradaptasi dan mencari solusi melalui praktik lingkungan yang berkelanjutan. Gerakan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran keluarga untuk mengelola lingkungan hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan

Isu lingkungan yang berhubungan dengan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KRR) global berpusat pada dampak perubahan iklim terhadap akses dan layanan KRR, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan aksi

iklim dengan strategi KRR secara gender-responsive dan berbasis hak. Tantangan utama meliputi ketimpangan akses dan kualitas layanan KB, terutama bagi perempuan di negara berpenghasilan rendah, serta keterbatasan pendanaan dan penelitian yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan KRR.

- Isu Strategis Provinsi Maluku Utara sesuai Tupoksi Perangkat Daerah
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan sanitasi, pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemeliharaan kebersihan dan sanitasi lingkungan, serta pemahaman tentang kesehatan lingkungan dalam keluarga. Program PKK berupaya memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan melalui berbagai kegiatan dan penyuluhan, serta mempromosikan kegiatan gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Isu lingkungan terkait KB dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia meliputi keterbatasan akses dan kualitas layanan KB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, pandangan dan norma masyarakat yang resisten terhadap KB, kualitas sumber daya manusia yang rendah di bidang KB dan kesehatan reproduksi, serta risiko kehamilan tidak diinginkan dan dampak penyakit (IMS/HIV) akibat kurangnya pengetahuan dan akses terhadap layanan. Selain itu, isu ini juga berhubungan dengan Pembangunan berkelanjutan, seperti pencapaian tujuan Pembangunan Manusia dan Lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian pertumbuhan penduduk.

- Isu Strategis Kota Ternate sesuai Tupoksi Perangkat Daerah
Keterbatasan lahan yang mendorong pembangunan permukiman di daerah miring atau pesisir, menyebabkan masalah persampahan dan drainase serta peningkatan volume air limbah. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat memicu konversi lahan yang tidak terkendali dan berpotensi merusak pola spasial kota.

Isu lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga di Kota Ternate mencakup peningkatan volume sampah akibat perubahan pola konsumsi dan kurangnya kesadaran masyarakat, sanitasi yang buruk serta minimnya infrastruktur yang memadai di permukiman kumuh, yang semuanya memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik melalui program seperti bank sampah dan perbaikan infrastruktur sanitasi.

Isu lingkungan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) meliputi peningkatan emisi CO₂ akibat pertumbuhan populasi

yang tidak terkontrol, yang memperburuk perubahan iklim dan mengancam kesehatan reproduksi dan ibu, terutama di negara berkembang, serta kerentanan perempuan terhadap krisis iklim yang meningkatkan kekerasan berbasis gender dan membatasi akses ke layanan KB/KR, yang semuanya dapat diatasi dengan penerapan pendekatan terintegrasi antara aksi iklim dan layanan KB/KR yang berbasis hak dan gender.

- Isu Startegis KLHS RPJMD Kota Ternate sesuai Tupoksi Perangkat Daerah
Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), pernikahan dan kehamilan usia muda, serta keterbatasan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan KB. Permasalahan ini dapat menurunkan kualitas keutuhan keluarga, dan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemanfaatan program KB
- Isu Startegis Perangkat Daerah
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berfokus pada penurunan stunting, dengan upaya menempatkan pendamping keluarga dan PLKB di setiap kelurahan untuk edukasi dan pendampingan, serta penguatan keluarga melalui bimbingan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Selain itu, DPPKB mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kampung KB untuk mencegah stunting dan bersama Indonesia-PKK fokus pada peningkatan kualitas SDM keluarga, seperti melalui program makan bergizi dan pemeriksaan Kesehatan Isu strategis DPPKB Kota Ternate terkait Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi meliputi penanggulangan stunting, peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB yang berkeadilan, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi modern, serta persiapan remaja dan calon pengantin (cantin) untuk kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkelanjutan. Isu ini juga mencakup pemetaan dampak kependudukan dan penyusunan strategi untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Ternate, serta pemanfaatan inovasi dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan program.

Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemantauan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tantangan dalam memantau dan mengendalikan angka stunting serta tingkat kelahiran, dengan beberapa strategi yang telah dan sedang dilakukan adalah menempatkan pendamping keluarga dan PLKB di setiap kelurahan untuk memberikan edukasi, serta melakukan pemetaan dampak kependudukan	berkaitan dengan upaya meningkatkan akseptasi Program Keluarga Berencana (KB), menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta membentuk keluarga yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui berbagai program dan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.	Dampak pertumbuhan populasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti peningkatan polusi, kelangkaan air bersih, degradasi lahan, dan emisi gas rumah kaca. Pemantauan dan pengendaliannya meliputi upaya-upaya seperti program keluarga berencana (KB) untuk mengelola pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan yang mengintegrasikan dinamika populasi dengan mitigasi perubahan iklim.	dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti peningkatan pencemaran, kerusakan hutan, dan perubahan fungsi lahan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pemantauan melalui pengumpulan dan analisis data kependudukan, serta pengendalian melalui program Keluarga	Peningkatan jumlah penduduk adalah masalah persampahan dan air limbah. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan produksi sampah, yang diperparah oleh minimnya kesadaran dan fasilitas pengolahan sampah, serta pembangunan permukiman baru di daerah hulu yang tidak terlayani sampah	Data kependudukan yang akurat, perencanaan program keluarga berencana (KB) yang efektif, koordinasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk di Kota Ternate.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
	sesuai amanat undang-undang.			Berencana (KB) untuk mengendalikan angka kelahiran, pengembangan wilayah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, serta peningkatan kualitas penduduk agar seimbang dengan daya dukung lingkungan.		
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingginya ledakan penduduk yang menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak seimbang, terutama akibat migrasi, sehingga	Mencakup analisis dampak lingkungan dari program kependudukan, memastikan program Keluarga Berencana (KB) mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, serta	Isu lingkungan global terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat erat dengan tekanan sumber daya alam, seperti air bersih dan udara bersih, serta degradasi lingkungan akibat meningkatnya	Dampak negatif laju pertumbuhan penduduk tinggi terhadap lingkungan seperti peningkatan limbah, pencemaran air, dan degradasi sumber daya	Keterbatasan lahan yang mendorong pembangunan permukiman di daerah miring atau pesisir, menyebabkan masalah persampahan dan drainase serta peningkatan volume	Penekanan angka stunting melalui program pendampingan keluarga, edukasi kesehatan, dan penyediaan akses KB, serta pemetaan dampak ledakan penduduk seperti

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
	memerlukan pemetaan dan sinergi dengan mitra kerja untuk mengatasinya.	mengidentifikasi tantangan dan strategi seperti keterbatasan SDM, masalah partisipasi PUS dalam KB, dan pentingnya pemanfaatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan momentum pembinaan akseptor secara optimal.	konsumsi dan limbah. Pengendalian pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Upaya pengendalian ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan individu, terutama perempuan, untuk membuat pilihan reproduksi yang sehat, yang juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	alam, serta tantangan dalam pengendaliannya seperti keterbatasan akses dan kesadaran masyarakat akan program keluarga berencana, dan upaya penanganannya melalui program KB, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.	air limbah. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat memicu konversi lahan yang tidak terkendali dan berpotensi merusak pola spasial kota.	migrasi dan ketidakseimbangan pertumbuhan untuk merancang solusi terpadu dengan mitra kerja.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Penuntasan stunting, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui	Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), pernikahan dan kehamilan usia muda, serta	Isu lingkungan global berdampak langsung pada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, antara lain melalui krisis air dan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan	Isu lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga di Kota Ternate mencakup peningkatan volume	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berfokus pada penurunan stunting, dengan upaya

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
	pemberdayaan aspek pendidikan dan UKM, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti bibit pertanian untuk kelompok wanita tani. DPPKB berupaya mengatasi ini dengan penempatan pendamping keluarga di kelurahan dan program edukasi.	keterbatasan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan KB. Permasalahan ini dapat menurunkan kualitas keutuhan keluarga, dan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemanfaatan program KB	pangan akibat polusi dan degradasi tanah, serta ancaman bencana seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim, yang menuntut keluarga untuk beradaptasi dan mencari solusi melalui praktik lingkungan yang berkelanjutan. Gerakan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran keluarga untuk mengelola lingkungan hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan	sanitasi, pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemeliharaan kebersihan dan sanitasi lingkungan, serta pemahaman tentang kesehatan lingkungan dalam keluarga. Program PKK berupaya memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan melalui berbagai kegiatan dan penyuluhan, serta mempromosikan kegiatan gotong royong untuk menciptakan	sampah akibat perubahan pola konsumsi dan kurangnya kesadaran masyarakat, sanitasi yang buruk serta minimnya infrastruktur yang memadai di permukiman kumuh, yang semuanya memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik melalui program seperti bank sampah dan perbaikan infrastruktur sanitasi.	menempatkan pendamping keluarga dan PLKB di setiap kelurahan untuk edukasi dan pendampingan, serta penguatan keluarga melalui bimbingan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Selain itu, DPPKB mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kampung KB untuk mencegah stunting dan bersama Indonesia-PKK fokus pada peningkatan kualitas SDM keluarga, seperti melalui program

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
				lingkungan yang sehat.		makan bergizi dan pemeriksaan kesehatan
Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Rendahnya kesadaran remaja dan masyarakat tentang KB dan kesehatan reproduksi, minimnya pengawasan orang tua, serta perlu adanya Psikoedukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seks yang aman. DPPKB perlu meningkatkan upaya edukasi dan	ketidapahaman masyarakat tentang manfaat dan metode KB modern, tingginya angka “unmet need” (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), terbatasnya akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, serta masalah kehamilan tidak diinginkan, kehamilan risiko tinggi (terlalu muda, tua, dekat, atau banyak), dan penyakit terkait reproduksi seperti	Isu lingkungan yang berhubungan dengan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KRR) global berpusat pada dampak perubahan iklim terhadap akses dan layanan KRR, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan aksi iklim dengan strategi KRR secara gender-responsive dan berbasis hak. Tantangan utama meliputi ketimpangan akses dan kualitas layanan KB, terutama bagi perempuan di negara	Isu lingkungan terkait KB dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia meliputi keterbatasan akses dan kualitas layanan KB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, pandangan dan norma masyarakat yang resisten terhadap KB, kualitas sumber daya manusia yang rendah di bidang KB dan kesehatan reproduksi, serta	Isu lingkungan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) meliputi peningkatan emisi CO2 akibat pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol, yang memperburuk perubahan iklim dan mengancam kesehatan reproduksi dan ibu, terutama di negara berkembang, serta kerentanan perempuan terhadap krisis iklim yang meningkatkan	Isu strategis DPPKB Kota Ternate terkait Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi meliputi penanggulangan stunting, peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB yang berkeadilan, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi modern, serta persiapan remaja dan calon pengantin (cantin) untuk kehidupan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
	pendekatan khusus untuk remaja terkait kesehatan reproduksi, agar terhindar dari perilaku seks berbahaya dan kehamilan yang tidak diinginkan	Infeksi Menular Seksual (IMS)	berpenghasilan rendah, serta keterbatasan pendanaan dan penelitian yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan KRR.	risiko kehamilan tidak diinginkan dan dampak penyakit (IMS/HIV) akibat kurangnya pengetahuan dan akses terhadap layanan. Selain itu, isu ini juga berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, seperti pencapaian tujuan Pembangunan Manusia dan Lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian	kekerasan berbasis gender dan membatasi akses ke layanan KB/KR, yang semuanya dapat diatasi dengan penerapan pendekatan terintegrasi antara aksi iklim dan layanan KB/KR yang berbasis hak dan gender.	berkeluarga yang sehat dan berkelanjutan. Isu ini juga mencakup pemetaan dampak kependudukan dan penyusunan strategi untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Ternate, serta pemanfaatan inovasi dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan program.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan Dinas PPKB	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
				pertumbuhan penduduk.		



BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 adalah **“MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN ” (TERNATE ANDALAN JILID II)**.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate ditetapkan pada Misi ke 3 (tiga) Pembangunan daerah yaitu **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing”**.

Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Ternate, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Ternate dapat dijadikan sebagai III-4 peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Ternate sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Ternate yang semakin sejahtera.

Maka Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan,

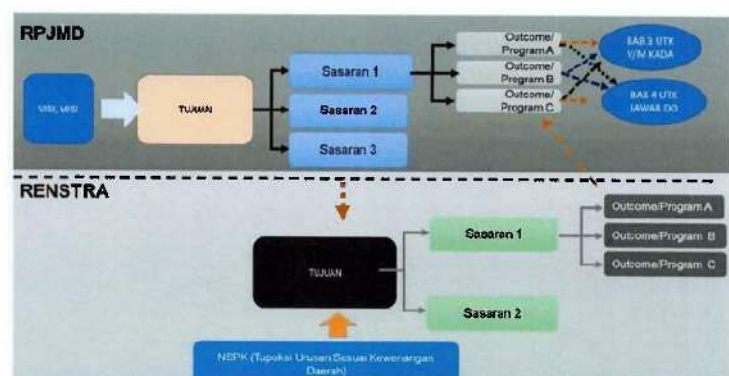
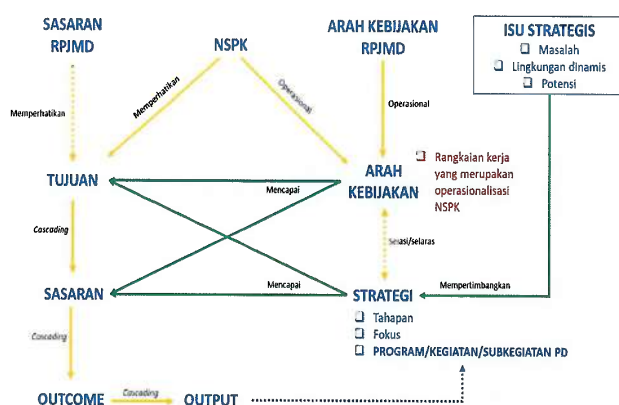
serta alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Penegndalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dikaitkan dengan program dan kegiatan diuraikan yakni” **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” dengan indikatornya adalah “Menurunnya Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)).

3.2 Sasaran

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berfokus pada” **Meningkatkan Keluarga yang berkualitas**” dengan indikator yakni : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berikut gambar konsep Renstra Perangkat Daerah dan Gambar Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah sesuai Edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.



Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini ;

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran TPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Kualitas SDM	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)	14,0	13,05	11,64	11,00	10,23	9,03	
		Meningkatkan Keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,82	66,85	66,88	66,91	66,94	66,96	
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,15	1,13	1,12	1,1	1,08	1,06	

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Ternate dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Tahapan fokus Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate untuk periode 2025-2029, dengan tambahan Tahun 2030 sebagai tahun evaluasi dan penyiapan Renstra berikutnya. Fokus ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, regional, dan lokal untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Fase I: Penguatan dan Stabilisasi (2025-2026)

Fase ini berfokus pada pemantapan fondasi program-program dasar.

- 1. Pada tahun 2025**, fokus utama adalah revitalisasi dan penguatan pelayanan KB. Ini mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan, serta sosialisasi masif tentang pentingnya KB .
- 2. Tahun 2026** dilanjutkan dengan stabilisasi program pengendalian penduduk. Kegiatannya meliputi pemutakhiran data kependudukan, pemetaan wilayah dengan angka kelahiran tinggi, dan pengembangan model intervensi yang tepat sasaran.

Fase II: Inovasi dan Ekstensifikasi (2027-2028)

Setelah fondasi program mantap, fase ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan memperluas cakupan program.

- 3. Tahun 2027** adalah tahun inovasi pelayanan terpadu. DPPKB akan berkolaborasi dengan instansi lain (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dll.) untuk menyediakan layanan terpadu, seperti layanan KB yang terintegrasi dengan kesehatan ibu dan anak, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 4. Tahun 2028** difokuskan pada ekstensifikasi program hingga tingkat kelurahan dan RT/RW. Ini melibatkan pembentukan dan penguatan kader KB serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kependudukan (misalnya, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK-R) untuk menjadi ujung tombak di lapangan.

Fase III: Sinergi dan Keberlanjutan (2029-2030)

Fase ini berorientasi pada penguatan sinergi dan memastikan keberlanjutan program. Pada

5. Tahun 2029, fokusnya adalah sinergi kemitraan strategis. DPPKB akan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk menginternalisasi nilai-nilai keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tengah masyarakat .

6. Tahun 2030 adalah tahun evaluasi dan perencanaan ulang. Pada tahun ini, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian Renstra 2025-2029, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan, serta menyusun draft awal Renstra 2030-2034 berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Penetapan fokus RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar berikut ini.

*Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Ternate*

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
fokus utama adalah revitalisasi dan penguatan pelayanan KB. Ini mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan, serta sosialisasi masif tentang pentingnya KB	dilanjutkan dengan stabilisasi program pengendalian penduduk. Kegiatannya meliputi pemutakhiran data kependudukan, pemetaan wilayah dengan angka kelahiran tinggi, dan pengembangan model intervensi yang tepat sasaran	inovasi pelayanan terpadu. DPPKB akan berkolaborasi dengan instansi lain (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dll.) untuk menyediakan layanan terpadu, seperti layanan KB yang terintegrasi dengan kesehatan ibu dan anak, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga	Di tahun 2028 difokuskan ekstensifikasi program hingga tingkat kelurahan dan RT/RW. Ini melibatkan pembentukan dan penguatan kader KB serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kependudukan (misalnya, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK-R) untuk menjadi ujung tombak di lapangan.	Di tahun 2029 fokusnya adalah sinergi kemitraan strategis. DPPKB akan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk menginternalisasi nilai-nilai keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tengah masyarakat	tahun evaluasi dan perencanaan ulang. Pada tahun ini, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian Renstra 2025-2029, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan, serta menyusun draft awal Renstra 2030-2034 berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

3.4 ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029.

Arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate tahun 2025-2045, yang berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Kebijakan ini akan diimplementasikan dalam kerangka visi dan misi pemerintah kota, yang meliputi kemandirian ekonomi, pemerintahan yang responsif, dan pelayanan publik berkualitas, serta mengatasi tantangan kependudukan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, yang dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029, dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga Berencana	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
3			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2029 dan upaya pencapaian sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah. Strategi dan Kebijakan yang di laksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga sejahtera¹) dan rentan lainnya, PUS Mufar (Muda dan Faritas Rendah), daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan,serta daerah dengan Umnet Need KB tinggi;
2. Peningkatan promosi dan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan Kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status Kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi;
3. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya;
4. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga;
5. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera 1, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga,melalui kegiatan usaha ekonomi produktif;
6. Pengoptimalisasian upaya-upaya Advokasi,promosi,KIE program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan KB yang berkualitas;
7. Pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama ditingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen Program KB Nasional;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB berbasisi teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam Mendukung penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2025-2029, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate tentunya mengimplementasikan rencana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

4.2 Uraian Kegiatan

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
9. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
11. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
12. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
13. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
14. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
15. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Ternate Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Kualitas SDM	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)			
		Meningkatkan Keluarga yang berkualitas			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
					Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			
			TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN		Nilai Sakip	1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksannya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah	1.02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Perangkat Daerah				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi dan jasa penunjang Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang Perangkat Daerah	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Mebel	01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					"Jumlah Lembaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"	01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			TERKENDALINYA ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK		1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)			
				Terlaksannya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga B	02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
					Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi program Bangga Kencana	02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA, TERJAGANYA KESEHATAN IBU DAN ANAK, PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, SERTA PEMBENTUKAN KELUARGA YANG SADAR KB DAN SEJAHTERA		1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	3.02	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)			

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksannya Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Penyebarluasan KIE sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi K	03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya	03.2.01.0013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepa	03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Tersedianya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Peningkatan Kinerja penyuluh KB/PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana(Persen)	03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini L	03.2.02.0005	Pembinaa IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kepend	03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan faskes dalam pelayanan KB dan pemenuhan ketersediaan alokon di faskes (Persen)	03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringn	03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					"Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)"	03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah laporan yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
				Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Bangga Kencana secara terpadu	03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan)	03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			TERWUJUDNYA KELUARGA YANG MAMPU MENJALANKAN FUNGSI KELUARGANYA SECARA OPTIMAL, MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN MANDIRI, SERTA DAPAT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATIN		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	4.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Pembangunan Keluarga dan Penguatan Poktan (BKB,BKR/PIK.R, BKL dan UPPKA)	04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
					Jumlah sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Laporan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan K	04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran Serta Organisasi Masyarakat/Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin / kelahiran, Baduta / Balita) yang mendapat pendampingan	04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)		16,6	14,0		13,05		11,64		11,00		10,23		9,03	
	Meningkatnya Keluarga yang berkualitas			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		66,75	66,82		66,85		66,88		66,91		66,94		66,96	
				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,16	1,15		1,13		1,12		1,1		1,08		1,06	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
		1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	BB	BB	5.473.534.125	BB	6.489.926.745	BB	6.736.722.314	BB	6.760.110.000	BB	6.485.110.000	BB	7.199.083.936

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	69.776.500	5 Laporan	96.069.695	5 Laporan	107.398.120	5 Laporan	107.398.120	5 Laporan	102.643.630	5 Laporan	121.026.801
		01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.709.380	2 Dokumen	75.709.380	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	88.728.978
		01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.398.120	1 Dokumen	7.398.120	1 Dokumen	7.398.120	1 Dokumen	7.398.120	1 Dokumen	7.297.823	1 Dokumen	7.297.823
		01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.999.800	1 Laporan	6.292.995	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
		01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.669.200	1 Kegiatan	6.669.200	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.345.807	1 Laporan	15.000.000
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3.513.934.375	2 Laporan	3.518.934.375	2 Laporan	3.518.934.375	2 Laporan	3.518.934.375	2 Laporan	3.518.934.375	2 Laporan	3.518.934.375

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Perangkat Daerah														
		01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	29 Orang	3.513.934.375	29 Orang	3.513.934.375	29 Orang	3.513.934.375	29 Orang	3.513.934.375	29 Orang	3.513.934.375	29 Orang	3.513.934.375
		01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	100%	1 Laporan	51.844.000	3 Laporan	86.844.000	3 Laporan	140.202.150	3 Laporan	127.454.745	2 Laporan	130.000.000	3 Laporan	257.000.000
		01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Pegawai	0 Pegawai	0 Pegawai	-	1 Pegawai	5.000.000	1 Pegawai	7.000.000	1 Pegawai	7.000.000	0 Pegawai	-	1 Pegawai	7.000.000
		01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	50.000.000
		01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	6 Orang	51.844.000	6 Orang	51.844.000	8 Orang	103.202.150	10 Orang	90.454.745	8 Orang	100.000.000	8 Orang	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	291.665.370	15 Laporan	376.764.795	15 Laporan	476.133.360	18 Laporan	476.133.360	18 Laporan	476.133.360	18 Laporan	529.133.360
		01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Buah	10 Buah	10 Buah	3.703.810	10 Buah	3.703.810	15 Buah	5.000.000	15 Buah	5.000.000	10 Buah	5.000.000	10 Buah	5.000.000
		01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Buah	100 Buah	100 Buah	60.654.200	100 Buah	63.753.625	150 Buah	100.000.000	150 Buah	100.000.000	100 Buah	100.000.000	100 Buah	150.000.000
		01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0 Unit	-	10 Unit	7.000.000	10 Unit	7.000.000	10 Unit	7.000.000	10 Unit	7.000.000	10 Unit	10.000.000
		01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Dos	200 Dos	200 Dos	20.640.000	200 Dos	20.640.000	200 Dos	20.640.000	200 Dos	20.640.000	200 Dos	20.640.000	200 Dos	20.640.000
		01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5000 Lembar	5000 Lembar	5000 Lembar	12.843.360	5000 Lembar	12.843.360	5000 Lembar	12.843.360	5000 Lembar	12.843.360	5000 Lembar	12.843.360	5000 Lembar	12.843.360
		01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	5.650.000	2 Eksemplar	80.650.000	2 Eksemplar	80.650.000	2 Eksemplar	80.650.000	2 Eksemplar	80.650.000	2 Eksemplar	80.650.000
		01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	8 Laporan	8 Orang	8 Orang	188.174.000	8 Orang	188.174.000	12 Orang	250.000.000	12 Orang	250.000.000	8 Orang	250.000.000	8 Orang	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Konsultasi SKPD														
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	62 Unit	n/a	0%	74 Unit	365.000.000	94 Unit	409.904.909	104 unit	440.000.000	94 Unit	370.000.000	105 Unit	550.000.000
		01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	-	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000
		01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	-	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	3 Unit	90.000.000
		01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel	n/a	45 Unit	n/a	-	50 Unit	100.000.000	60 Unit	150.000.000	60 Unit	150.000.000	60 Unit	150.000.000	60 Unit	200.000.000
		01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	17 Unit	n/a	-	20 Unit	145.000.000	30 Unit	139.904.909	40 Unit	170.000.000	30 Unit	100.000.000	40 Unit	200.000.000
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.454.364.480	3 Laporan	1.454.364.480	3 Laporan	1.492.200.000	3 Laporan	1.492.200.000	3 Laporan	1.492.200.000	3 Laporan	1.605.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Lembaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	25 Lembar	25 Lembar	25 Lembar	2.200.000	25 Lembar	2.200.000	25 Lembar	2.200.000	25 Lembar	2.200.000	25 Lembar	2.200.000	25 Lembar	5.000.000
		01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80.604.480	12 Bulan	80.604.480	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000
		01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.371.560.000	12 Bulan	1.371.560.000	12 Bulan	1.400.000.000	12 Bulan	1.400.000.000	12 Bulan	1.400.000.000	12 Bulan	1.500.000.000
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	91.949.400	3 Laporan	591.949.400	3 Laporan	591.949.400	3 Laporan	597.989.400	3 Laporan	395.198.635	3 Laporan	617.989.400
		01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	67.989.400	5 Unit	67.989.400	5 Unit	67.989.400	5 Unit	67.989.400	5 Unit	65.198.635	5 Unit	67.989.400
		01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	23.960.000	10 Unit	23.960.000	10 Unit	23.960.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000
		2.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,07	2,07	2,5		2,3		2,1		1,9		1,7		1,5	
				2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	4,8	4,8	4,5	232.999.998	4,3	425.267.000	4,1	475.267.000	3,9	485.267.000	3,7	485.267.000	3,5	486.293.064
		02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Dokumen	n/a	n/a	-	1 Dokumen	30.000.000	100%	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	91.026.064

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	n/a	n/a	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	31.026.064
		02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga B	1	n/a	n/a	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
		02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	n/a	n/a	n/a	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
		02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	232.999.998	5 Laporan	395.267.000	5 Laporan	395.267.000	5 Laporan	395.267.000	5 Laporan	395.267.000	5 Laporan	395.267.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	n/a	n/a	n/a	-	1 Laporan	162.267.002	1 Laporan	162.267.002	1 Laporan	162.267.002	1 Laporan	162.267.002	1 Laporan	162.267.002
		02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	129.999.998	2 Laporan	129.999.998	2 Laporan	129.999.998	2 Laporan	129.999.998	2 Laporan	129.999.998	2 Laporan	129.999.998
		02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	103.000.000
		3.02	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	80,96	87,60	88	4.347.290.002	88,6	3.093.023.000	89,2	2.873.023.000	90	2.893.023.000	90,6	3.333.023.000	91,5	3.273.023.000
				2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	7,3	6,94	6,12		5,92		5,57		5,33		5,01		4,91	
		03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.205.267.002	8 Laporan	1.073.000.000	8 Laporan	1.073.000.000	8 Laporan	1.063.000.000	8 Laporan	1.063.000.000	8 Laporan	1.063.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000
		03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	343.000.000	1 Laporan	343.000.000	1 Laporan	343.000.000	1 Laporan	343.000.000	1 Laporan	343.000.000	1 Laporan	343.000.000
		03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi K	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000
		03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa														
		03.2.01.0013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.267.002	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-
		03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepa	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000
		03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja penyuluh KB/PLKB dalam capaian Program	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2.190.206.000	3 Laporan	1.008.206.000	3 Laporan	758.206.000	3 Laporan	758.206.000	4 Laporan	1.158.206.000	4 Laporan	1.058.206.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Bangga Kencana(Perse n)														
		03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	n/a	n/a	n/a	-	32 Buah	16.000.000	32 Buah	16.000.000	32 Buah	16.000.000	32 Buah	16.000.000	32 Buah	16.000.000
		03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Kader	100 Kader	100 Kader	692.206.000	100 Kader	692.206.000	100 Kader	692.206.000	100 Kader	692.206.000	100 Kader	692.206.000	100 Kader	692.206.000
		03.2.02.0005	Pembinaa IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini L	n/a	n/a	n/a	-	n/a	-	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000
		03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan	0 Balai penyuluhan KB	0 Balai penyuluhan KB	6 Balai penyuluhan KB	1.498.000.000	2 Balai penyuluhan KB	300.000.000	0 Balai penyuluhan KB	-	0 Balai penyuluhan KB	-	8 Balai penyuluhan KB	400.000.000	5 Balai penyuluhan KB	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Berencana (PKB/PLKB)	Keluarga Kepend														
		03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	671.119.000	4 Laporan	671.119.000	5 Laporan	701.119.000	6 Laporan	731.119.000	6 Laporan	771.119.000	6 Laporan	771.119.000
		03.2.03. 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	"Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)"	1465 Akseptor	1252 Akseptor	1731 Akseptor	502.119.000	1731 Akseptor	502.119.000	1731 Akseptor	502.119.000	1731 Akseptor	502.119.000	1731 Akseptor	502.119.000	1731 Akseptor	502.119.000
		03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	109.000.000	2 Laporan	109.000.000	2 Laporan	109.000.000	2 Laporan	109.000.000	2 Laporan	109.000.000	2 Laporan	109.000.000
		03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
		03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah laporan yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
		03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	280.698.000	3 Laporan	340.698.000	3 Laporan	340.698.000	3 Laporan	340.698.000	3 Laporan	340.698.000	2 Laporan	380.698.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
		03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	50.000.000
		03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	1 Kelurahan	1 Kelurahan	0 Kelurahan	-	3 Kelurahan	30.000.000	3 Kelurahan	30.000.000	3 Kelurahan	30.000.000	3 Kelurahan	30.000.000	5 Kelurahan	50.000.000
		03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan)	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	280.698.000	8 Kelurahan	280.698.000	8 Kelurahan	280.698.000	8 Kelurahan	280.698.000	8 Kelurahan	280.698.000	8 Kelurahan	280.698.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	90.30%	91.25%	93.00%	1.096.600. 000	95.56%	1.141.783. 255	97.85%	1.164.987. 686	99.00%	1.286.600. 000	100%	1.296.600. 000	100%	1.316.600. 000
		04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	160.000.0 00	4 Laporan	205.183.2 55	5 Laporan	228.387.6 86	6 Laporan	350.000.0 00	6 Laporan	360.000.0 00	6 Laporan	380.000.0 00
		04.2.01. 0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	n/a	1 Laporan	n/a	-	1 Laporan	30.000.00 0	1 Laporan	30.000.00 0	1 Laporan	50.000.00 0	1 Laporan	50.000.00 0	1 Laporan	50.000.00 0
		04.2.01. 0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Jumlah sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	n/a	n/a	n/a	-	2 Sekolah	30.000.00 0	2 Sekolah	38.387.68 6	2 Sekolah	50.000.00 0	2 Sekolah	50.000.00 0	2 Sekolah	50.000.00 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	n/a	n/a	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000
		04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	27 Unit	25 Unit	13 Unit	130.000.000	10 Unit	100.000.000	13 Unit	130.000.000	13 Unit	130.000.000	13 Unit	130.000.000	13 Unit	130.000.000
		04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan K	n/a	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	n/a	n/a	-	30 Orang	15.183.255	100 Orang	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000
		04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	750 Orang	750 Orang	750 Orang	936.600.000	750 Orang	936.600.000	750 Orang	936.600.000	750 Orang	936.600.000	750 Orang	936.600.000	750 Orang	936.600.000
		04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	375 Orang	375 Orang	375 Orang	375.000.000	375 Orang	375.000.000	375 Orang	375.000.000	375 Orang	375.000.000	375 Orang	375.000.000	375 Orang	375.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.02. 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin / kelahiran, Baduta / Balita) yang mendapat pendampingan	375 Orang	375 Orang	375 Orang	561.600.0 00	375 Orang	561.600.0 00	375 Orang	561.600.0 00	375 Orang	561.600.0 00	375 Orang	561.600.0 00	375 Orang	561.600.0 00
Total :								11.150.42 4.125		11.150.00 0.000		11.250.00 0.000		11.425.00 0.000		11.600.00 0.000		12.275.00 0.000

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prog Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN		
1.1		Terlaksannya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.2		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.3		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.3.1			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
1.3.2			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.3.3			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.4.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1.4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.4.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1.4.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1.4.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1.4.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
1.4.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.5.1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1.5.2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.5.3			Pengadaan Mebel	
1.5.4			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.6		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.6.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.6.2			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
1.6.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1.7		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.7.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.7.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.7.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TERKENDALINYA ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK		
2.1		Terlaksannya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
2.1.1			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
2.1.2			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
2.1.3			Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
2.2		Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
2.2.1			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
2.2.2			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
2.2.3			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA, TERJAGANYA KESEHATAN IBU DAN ANAK, PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, SERTA PEMBENTUKAN KELUARGA YANG SADAR KB DAN SEJAHTERA		
3.1		Terlaksannya Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
3.1.1			Pengendalian Program KKBPK	
3.1.2			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
3.1.3			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa	
3.1.4			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
3.1.5			Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
3.1.6			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
3.2		Tersedianya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
3.2.1			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
3.2.2			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
3.2.3			Pembinaa IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
3.2.4			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
3.3		Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
3.3.1			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
3.3.2			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
3.3.3			Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
3.3.4			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
3.3.5			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
3.4		Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
3.4.1			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
3.4.2			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
3.4.3			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	TERWUJUDNYA KELUARGA YANG MAMPU MENJALANKAN FUNGSI KELUARGANYA SECARA OPTIMAL, MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN MANDIRI, SERTA DAPAT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATIN		
4.1		Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
4.1.1			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
4.1.2			Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
4.1.3			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
4.1.4			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
4.1.5			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
4.1.6			Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
4.2		Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
4.2.1			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	
4.2.2			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	66,82	66,85	66,88	66,91	66,94	66,96	
2	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,15	1,13	1,12	1,1	1,08	1,06	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sakip	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Persen	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Persen	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	88	88,6	89,2	90	90,6	91,5	
5	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	6,12	5,92	5,57	5,33	5,01	4,91	
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	93,00	95,56	97,85	99,00	100	100	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025 -2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dan keberhasilan Rencana Strategis

ini dapat diwujudkan dengan adanya komitmen dan kesepahaman yang sama dalam pelaksanaannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kota Ternate Tahun 2025-2029 : "Mewujudkan Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan"- TERNATE ANDALAN JILID II.

Ternate, 01 September 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Ternate**



RAJMAN, S.KM., M.Kes
NIP. 197801172010011006